

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Aceh

Hilda Zilviana Sodikin¹, Medi Nopiana² ✉

Program Studi Manajemen, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan daerah di Provinsi Aceh dilihat dari : (1) Rasio kemandirian keuangan daerah, (2) Rasio efektivitas, (3) Rasio efisiensi keuangan daerah, dan (4) Rasio pertumbuhan pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Hasil penelitian dilihat dari (1) Rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong Rendah Sekali dan memiliki hasil pola hubungan yang instruktif (2) Rasio efektivitas secara keseluruhan memiliki hasil tidak efektif (3) Rasio efisiensi keuangan daerah secara keseluruhan memiliki hasil tidak efisien (4) Rasio pertumbuhan pendapatan memiliki hasil belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal, maka pertumbuhannya negatif.

Kata Kunci: *kinerja keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan.*

Abstract

This study aims to analyze the regional financial performance in Aceh Province as seen from: (1) Regional financial independence ratio, (2) Effectiveness ratio, (3) Regional financial efficiency ratio, and (4) Income growth ratio. This study uses quantitative descriptive analysis research methods. The sample used was 23 districts/cities in Aceh Province. The results of the study are seen from (1) The ratio of regional financial independence is still very low and has an instructive relationship pattern (2) The overall effectiveness ratio has ineffective results (3) The overall regional financial efficiency ratio has inefficient results (4) Ratio revenue growth has a result of operating expenditure greater than capital expenditure, then the growth is negative.

Keywords: *regional financial performance, regional financial independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, income growth ratio.*

Copyright (c) 2021 Hilda Zilviana Sodikin

✉ Corresponding author :

Email Address : hildazs.sman6@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam mendukung akselerasi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, berdasarkan tiga elemen utama yaitu

ekonomis, efisien dan efektif, serta transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2018). Salah satu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah kinerja keuangan daerah (Poyoh et al., 2017). Kinerja keuangan daerah merupakan wujud dari fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi (Salhefni & Digdowiseiso, 2021). Fungsi tersebut merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan daerah, yang tujuan utamanya adalah menurunkan tingkat kemiskinan (Soleh, 2015).

Pemerintah Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang menerima dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat, berupa dana otonomi khusus (Otsus). Selain dana Otsus, Pemerintah Aceh juga mendapatkan dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Secara teoritis, dana transfer ke daerah yang besar dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerahnya. Hal tersebut menandakan terdapat permasalahan kinerja keuangan daerah Provinsi Aceh yang belum optimal dalam mencapai kinerja makroekonomi daerah yang diharapkan, khususnya dalam penurunan tingkat kemiskinan.

METODOLOGI

Data yang digunakan merupakan data skunder berupa laporan keuangan kabupaten/kota Provinsi Aceh yang diambil dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dari tahun 2015-2019. Kinerja keuangan daerah dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1Presentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Aceh Barat	15,97	14,33	15,90	14,51	13,02
2	Kab. Aceh Besar	11,93	9,34	10,08	11,88	11,71
3	Kab. Aceh Selatan	9,35	11,10	11,74	12,87	12,33

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
4	Kab. Aceh Singkil	5,81	5,03	5,45	6,76	6,56
5	Kab. Aceh Tengah	16,60	11,62	12,36	14,20	18,15
6	Kab. Aceh Tenggara	6,34	5,36	5,91	8,06	11,00
7	Kab. Aceh Timur	9,67	8,97	14,61	16,49	16,73
8	Kab. Aceh Utara	12,69	21,22	10,25	15,73	12,67
9	Kab. Bireuen	13,02	12,56	11,61	12,05	9,88
10	Kab. Pidie	15,79	14,26	16,57	14,85	15,28
11	Kab. Simeulue	8,13	6,98	8,02	8,60	10,72
12	Kota Banda Aceh	25,89	29,98	33,44	29,66	27,69
13	Kota Sabang	11,59	9,23	10,99	10,52	11,57
14	Kota langsa	18,80	16,36	15,34	18,75	17,06
15	Kota Lhokseumawe	7,45	6,95	7,92	10,26	8,14
16	Kab. Gayo Lues	4,85	5,89	8,81	6,27	5,94
17	Kab. Aceh Barat Daya	8,72	9,87	12,38	10,96	12,31
18	Kab. Aceh Jaya	6,01	6,04	7,05	9,46	8,79
19	Kab. Nagan Raya	10,48	12,04	8,63	11,30	10,20

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
20	Kab. Aceh Tamiang	10,14	10,14	10,33	14,55	12,00
21	Kab. Bener Meriah	9,19	8,44	10,25	11,01	9,56
22	Kab. Pidie Jaya	6,14	5,68	5,78	7,55	8,77
23	Kota Subulussalam	6,24	7,15	10,10	8,17	9,31

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021)

Tabel 2 Pola Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Aceh Barat	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
2	Kab. Aceh Besar	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
3	Kab. Aceh Selatan	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
4	Kab. Aceh Singkil	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
5	Kab. Aceh Tengah	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
6	Kab. Aceh Tenggara	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
7	Kab. Aceh Timur	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
8	Kab. Aceh Utara	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
9	Kab. Bireuen	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
10	Kab. Pidie	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
11	Kab. Simeulue	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
12	Kota Banda Aceh	Konsultif	Konsultif	Konsultif	Konsultif	Konsultif
13	Kota Sabang	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
14	Kota langsa	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
15	Kota Lhokseumawe	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
16	Kab. Gayo Lues	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
17	Kab. Aceh Barat Daya	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
18	Kab. Aceh Jaya	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
19	Kab. Nagan Raya	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
20	Kab. Aceh Tamiang	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
21	Kab. Bener Meriah	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
22	Kab. Pidie Jaya	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif
23	Kota Subulussalam	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Instruktif

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.24 dan pola hubungan pada tabel 2 di atas diketahui bahwa kemampuan kemandirian keuangan di setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh tergolong masih sangat rendah $\leq 25\%$. Kota Banda Aceh selama tahun 2015-2019 memiliki pola hubungan yang konsultif sedikit lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di Provinsi Aceh dengan pola hubungan yang instruktif.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Harliyani dan Haryadi (2016) di Provinsi Jambi menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah sangat kurang (instruktif) dan di Provinsi Aceh juga instruktif. Perbandingan kedua daerah tersebut dikatakan memiliki kinerja yang

rendah sekali yakni dalam kategori pola hubungan instruktif. Secara keseluruhan peran pemerintah pusat masih sangat mendominasi dibandingkan peran pemerintah daerah yakni daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya dengan baik.

Pola hubungan instruktif ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat rendah yang artinya tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun rendah.

2. Rasio Efektivitas

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 Presentase Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Aceh Barat	107,81	122,69	108,39	91,69	91,17
2	Kab. Aceh Besar	153,91	123,03	127,94	120,46	126,42
3	Kab. Aceh Selatan	117,24	133,81	119,10	91,69	94,18
4	Kab. Aceh Singkil	106,13	80,83	87,59	82,00	77,68
5	Kab. Aceh Tengah	106,78	109,09	103,94	82,39	105,23
6	Kab. Aceh Tenggara	92,10	98,28	80,96	108,60	117,70
7	Kab. Aceh Timur	94,13	78,82	134,20	94,72	98,30
8	Kab. Aceh Utara	100,77	183,75	81,78	83,51	114,22
9	Kab. Bireuen	103,35	103,34	100,80	89,66	89,12
10	Kab. Pidie	111,23	108,66	86,97	72,40	86,19
11	Kab. Simeulue	127,94	120,72	138,04	132,20	121,22
12	Kota Banda Aceh	125,63	122,16	112,37	83,65	81,83

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
13	Kota Sabang	96,24	88,44	112,67	122,70	109,27
14	Kota langsa	98,89	100,86	96,81	96,56	74,61
15	Kota Lhokseumawe	116,72	84,41	90,36	98,64	88,48
16	Kab. Gayo Lues	146,07	115,30	128,39	89,58	74,45
17	Kab. Aceh Barat Daya	101,98	107,33	109,85	93,60	102,34
18	Kab. Aceh Jaya	109,64	93,79	89,76	104,83	101,08
19	Kab. Nagan Raya	121,50	102,77	73,81	81,32	62,82
20	Kab. Aceh Tamiang	92,75	88,68	90,47	98,20	95,97
21	Kab. Bener Meriah	98,55	109,45	83,65	73,20	93,27
22	Kab. Pidie Jaya	148,01	93,71	96,11	82,05	99,51
23	Kota Subulussalam	96,99	97,26	101,06	63,30	90,03

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021)

Tabel 3 Kriteria Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Aceh Barat	Efektif	Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
2	Kab. Aceh Besar	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif
3	Kab. Aceh Selatan	Efektif	Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
4	Kab. Aceh Singkil	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
5	Kab. Aceh Tengah	Efektif	Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Efektif
6	Kab. Aceh Tenggara	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Efektif	Efektif
7	Kab. Aceh Timur	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
8	Kab. Aceh Utara	Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Efektif
9	Kab. Bireuen	Efektif	Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
10	Kab. Pidie	Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
11	Kab. Simeulue	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif
12	Kota Banda Aceh	Efektif	Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
13	Kota Sabang	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Efektif	Efektif	Efektif
14	Kota langsa	Tidak Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
15	Kota Lhokseumawe	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
16	Kab. Gayo Lues	Efektif	Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
17	Kab. Aceh Barat Daya	Efektif	Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Efektif
18	Kab. Aceh Jaya	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Efektif	Efektif
19	Kab. Nagan Raya	Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
20	Kab. Aceh Tamiang	Tidak Efektif				
21	Kab. Bener Meriah	Tidak Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
22	Kab. Pidie Jaya	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif
23	Kota Subulussalam	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Efektif	Tidak Efektif	Tidak Efektif

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.26 dan kriteria pada tabel 3 di atas diketahui bahwa efektivitas kabupaten/kota di provinsi Aceh masih belum baik. Hal ini di buktikan di setiap kabupaten/kota selama tahun 2015-2019 memiliki rata-rata rasio tidak efektif, hanya kabupaten simeuleu yang konsisten dengan rasio diatas 100% dengan krteria efektif. Penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah di setiap kabupaten/kota masih terbilang kurang dari yang dianggarkan sebelumnya, sehingga membuat rasio pada kabupaten/kota yang ada di provinsi aceh tidak efektif.

Pada penelitian yang dilakukan Harahap (2020) di Kabupaten Tapanuli Tengah menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah dilihat dari rasio efektifitas dikategorikan cukup efektif sedangkan pada Provinsi Aceh tidak efektif. Karena penerimaan Provinsi Aceh dari sektor pajak dan retribusi daerah kurang dari yang dianggarkan sebelumnya, diharapkan Provisi Aceh dapat memaksimalkan potensi-potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah lainnya, agar Provinsi Aceh dapat melampaui target biaya yang telah ditentukan.

3. Rasio Efsisiensi Keuangan Daerah

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4 Presentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Aceh Barat	102,44	102,67	99,16	97,25	97,69
2	Kab. Aceh Besar	94,22	104,82	97,71	104,00	100,44
3	Kab. Aceh Selatan	96,74	101,45	100,30	99,35	101,88
4	Kab. Aceh Singkil	99,09	107,34	99,88	98,72	98,88

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
5	Kab. Aceh Tengah	96,61	105,08	99,76	98,04	99,97
6	Kab. Aceh Tenggara	100,87	99,06	95,71	107,11	100,33
7	Kab. Aceh Timur	98,34	101,59	101,75	99,28	101,96
8	Kab. Aceh Utara	101,74	100,82	99,87	99,94	101,18
9	Kab. Bireuen	96,40	105,38	98,08	100,44	99,17
10	Kab. Pidie	98,06	103,63	95,85	102,24	101,52
11	Kab. Simeulue	97,20	97,98	100,16	102,19	102,94
12	Kota Banda Aceh	97,69	100,75	98,46	103,34	101,17
13	Kota Sabang	109,80	95,78	95,32	97,11	101,58
14	Kota langsa	99,98	101,44	100,67	98,19	102,26
15	Kota Lhokseumawe	105,18	97,96	96,50	103,48	101,01
16	Kab. Gayo Lues	95,67	100,47	100,52	101,36	104,33
17	Kab. Aceh Barat Daya	95,53	107,20	96,05	92,33	101,35
18	Kab. Aceh Jaya	98,33	104,57	100,99	111,62	98,30
19	Kab. Nagan Raya	102,11	99,49	100,30	100,50	100,15
20	Kab. Aceh Tamiang	103,92	97,13	101,26	96,64	102,66
21	Kab. Bener Meriah	99,06	101,73	99,88	100,10	99,64
22	Kab. Pidie Jaya	98,17	99,06	72,04	140,10	97,59

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
23	Kota Subulussalam	97,55	103,28	100,98	100,21	98,79

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021)

Tabel 5 Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Aceh Barat	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Efisien	Efisien
2	Kab. Aceh Besar	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien
3	Kab. Aceh Selatan	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
4	Kab. Aceh Singkil	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Efisien	Efisien
5	Kab. Aceh Tengah	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Efisien	Efisien
6	Kab. Aceh Tenggara	Tidak Efisien	Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien
7	Kab. Aceh Timur	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
8	Kab. Aceh Utara	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Efisien	Tidak Efisien
9	Kab. Bireuen	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Efisien
10	Kab. Pidie	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien
11	Kab. Simeulue	Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien
12	Kota Banda Aceh	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien
13	Kota Sabang	Tidak Efisien	Efisien	Efisien	Efisien	Tidak Efisien

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
14	Kota langsa	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
15	Kota Lhokseumawe	Tidak Efisien	Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien
16	Kab. Gayo Lues	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien
17	Kab. Aceh Barat Daya	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Efisien	Tidak Efisien
18	Kab. Aceh Jaya	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Efisien
19	Kab. Nagan Raya	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien
20	Kab. Aceh Tamiang	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien
21	Kab. Bener Meriah	Efisien	Tidak Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Efisien
22	Kab. Pidie Jaya	Efisien	Efisien	Efisien	Tidak Efisien	Efisien
23	Kota Subulussalam	Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Efisien

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.28 dan kriteria pada tabel 5 di atas diketahui bahwa efisiensi kabupaten/kota di provinsi Aceh masih belum baik. Meskipun rasio setiap tahun 2015-2019 di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki presentase rasio efisien akan tetapi presentase efisiensi nya masih diatas 90% yang artinya pemerintah daerah di pengelolaan belanja daerah dan pendapatan daerah yang diterima, belum dilaksanakan secara maksimal. Pada kabupaten pidie jaya di tahun 2017 memiliki presentase efisiensi sebesar 72,04%, akan tetapi pada tahun berikutnya presentasinya meningkat sebesar 50% menjadi 140,10%.

Penelitian yang dilakukan oleh Mizkan (2015), menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Pekanbaru dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah adalah efisien sedangkan Provinsi Aceh memiliki rata-rata rasio tidak efisien. Pemerintah Kota Pekanbaru diketahui mampu menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerahnya dengan baik. Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh diharapkan untuk lebih menekankan lagi pengelolaan keuangan belanja daerah dan pendapatannya agar kinerja keuangannya membaik serta efisien.

4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Hasil dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6 Presentase Rasio Pertumbuhan Pendapatan (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Rata-Rata
1	Kab. Aceh Barat	7,81	15,03	-6,95	2,19	4,52
2	Kab. Aceh Besar	-3,73	7,52	9,64	6,53	4,99
3	Kab. Aceh Selatan	35,96	11,82	7,95	-7,95	11,94
4	Kab. Aceh Singkil	6,81	3,29	4,25	-0,06	3,58
5	Kab. Aceh Tengah	-1,11	4,40	-7,47	13,36	2,29
6	Kab. Aceh Tenggara	3,89	-2,28	33,65	46,55	20,45
7	Kab. Aceh Timur	-4,42	61,54	11,19	9,26	19,39
8	Kab. Aceh Utara	100,10	-47,95	48,22	-6,67	23,43
9	Kab. Bireuen	7,01	3,64	-6,98	-12,79	-2,28
10	Kab. Pidie	18,52	7,26	-11,36	2,54	4,24
11	Kab. Simeulue	5,89	25,59	3,36	25,85	15,17
12	Kota Banda Aceh	23,19	4,48	-8,85	-4,53	3,57
13	Kota Sabang	-3,68	15,29	3,83	3,74	4,79
14	Kota langsa	11,23	-1,01	0,98	-5,01	1,55
15	Kota Lhokseumawe	-0,37	11,78	4,18	-6,36	2,31

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Rata-Rata
16	Kab. Gayo Lues	11,76	30,33	-19,16	5,45	7,10
17	Kab. Aceh Barat Daya	31,55	13,76	-8,85	8,24	11,18
18	Kab. Aceh Jaya	13,34	14,91	11,46	24,14	15,96
19	Kab. Nagan Raya	30,35	-28,94	31,15	-9,77	5,70
20	Kab. Aceh Tamiang	13,54	1,92	19,80	-7,44	6,96
21	Kab. Bener Meriah	13,11	23,45	3,75	1,53	10,46
22	Kab. Pidie Jaya	3,17	3,09	21,14	19,85	11,81
23	Kota Subulussalam	17,85	33,57	-35,69	42,54	14,57

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021)

Tabel 7 Presentase Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Rata-Rata
1	Kab. Aceh Barat	18,11	5,38	-8,36	11,87	6,75
2	Kab. Aceh Besar	13,75	3,55	-7,50	10,72	5,13
3	Kab. Aceh Selatan	12,67	5,97	-11,94	6,71	3,35
4	Kab. Aceh Singkil	5,94	-2,46	-14,38	19,31	2,10
5	Kab. Aceh Tengah	12,07	-1,46	-16,35	9,84	1,02
6	Kab. Aceh Tenggara	19,26	-3,03	-21,32	21,86	4,19

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Rata-Rata
7	Kab. Aceh Timur	12,67	13,57	-17,80	20,47	7,23
8	Kab. Aceh Utara	21,75	-0,51	-6,26	15,71	7,67
9	Kab. Bireuen	10,20	14,79	-16,88	10,77	4,72
10	Kab. Pidie	19,20	4,90	-10,41	9,47	5,79
11	Kab. Simeulue	19,17	12,32	-15,72	15,77	7,89
12	Kota Banda Aceh	8,55	-5,85	-8,72	7,04	0,26
13	Kota Sabang	16,14	1,04	-4,50	7,91	5,15
14	Kota langsa	24,74	3,13	-20,52	12,79	5,04
15	Kota Lhokseumawe	8,74	-0,79	-16,89	15,38	1,61
16	Kab. Gayo Lues	12,16	-8,35	-11,89	11,09	0,75
17	Kab. Aceh Barat Daya	12,96	-5,16	-9,78	12,21	2,56
18	Kab. Aceh Jaya	9,14	2,15	-29,17	32,17	3,57
19	Kab. Nagan Raya	11,71	-0,93	-13,74	14,57	2,90
20	Kab. Aceh Tamiang	18,98	-4,29	-8,38	9,89	4,05
21	Kab. Bener Meriah	18,73	4,43	-14,76	17,84	6,56
22	Kab. Pidie Jaya	11,96	34,62	-36,73	22,74	8,15
23	Kota Subulussalam	25,07	-9,01	-24,95	28,69	4,95

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021)
**Tabel 8 Presentase Rasio Pertumbuhan Pendapatan (Belanja Modal)
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019**

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Rata-Rata
1	Kab. Aceh Barat	9,79	4,95	-38,56	36,94	3,28
2	Kab. Aceh Besar	51,23	-28,64	-9,97	11,32	5,99
3	Kab. Aceh Selatan	7,47	7,58	-41,04	15,62	-2,59
4	Kab. Aceh Singkil	-2,52	-36,57	-46,60	75,11	-2,64
5	Kab. Aceh Tengah	33,05	-19,68	-56,03	54,14	2,87
6	Kab. Aceh Tenggara	13,78	-7,71	-59,41	55,32	0,50
7	Kab. Aceh Timur	13,10	9,77	-66,00	178,63	33,88
8	Kab. Aceh Utara	-1,22	0,03	-40,42	88,42	11,70
9	Kab. Bireuen	0,84	35,24	-60,81	83,72	14,75
10	Kab. Pidie	26,22	-21,83	-11,77	12,23	1,21
11	Kab. Simeulue	21,25	34,60	-43,62	47,68	14,98
12	Kota Banda Aceh	17,41	-12,33	-55,73	47,84	-0,70
13	Kota Sabang	25,85	-25,87	-12,12	57,07	11,23
14	Kota langsa	68,65	13,22	-65,35	71,9	22,12
15	Kota Lhokseumawe	5,81	-5,25	-36,01	42,49	1,76

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Rata-Rata
16	Kab. Gayo Lues	11,44	-37,26	-24,41	3,68	-11,64
17	Kab. Aceh Barat Daya	48,06	-37,69	-26,68	56,82	10,13
18	Kab. Aceh Jaya	29,45	-18,40	-54,33	25,14	-4,53
19	Kab. Nagan Raya	-16,62	1,17	-44,57	57,24	-0,70
20	Kab. Aceh Tamiang	-5,11	-15,93	-39,33	36,87	-5,88
21	Kab. Bener Meriah	17,52	-12,00	-33,01	15,42	-3,02
22	Kab. Pidie Jaya	-2,98	-22,55	-23,59	14,58	-8,64
23	Kota Subulussalam	77,51	-24,37	-58,80	65,69	15,01

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021)

Tabel 9 Presentase Rasio Pertumbuhan Pendapatan (Belanja Operasi) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Rata-Rata
1	Kab. Aceh Barat	21,11	0,85	-1,55	7,75	7,04
2	Kab. Aceh Besar	20,97	3,63	0,09	6,16	7,71
3	Kab. Aceh Selatan	22,10	3,85	-3,29	8,17	7,71
4	Kab. Aceh Singkil	25,05	3,44	-6,51	10,49	8,12
5	Kab. Aceh Tengah	17,31	-0,28	-3,41	4,77	4,60

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Rata-Rata
6	Kab. Aceh Tenggara	18,45	-5,78	5,70	8,27	6,66
7	Kab. Aceh Timur	17,34	14,82	-7,73	8,81	8,31
8	Kab. Aceh Utara	25,72	-1,72	0,14	9,30	8,36
9	Kab. Bireuen	24,98	1,56	-3,52	1,90	6,23
10	Kab. Pidie	25,91	1,28	-3,15	8,13	8,04
11	Kab. Simeulue	19,82	9,53	-4,25	10,60	8,92
12	Kota Banda Aceh	10,71	-6,94	7,56	0,74	3,02
13	Kota Sabang	-5,99	11,07	-0,20	2,53	1,85
14	Kota langsa	14,61	-2,20	-1,72	8,15	4,71
15	Kota Lhokseumawe	-0,26	-1,19	-2,19	5,88	0,56
16	Kab. Gayo Lues	21,69	8,01	-6,82	17,17	10,01
17	Kab. Aceh Barat Daya	17,96	-3,25	-8,79	14,12	5,01
18	Kab. Aceh Jaya	10,37	7,18	-9,30	14,71	5,74
19	Kab. Nagan Raya	24,46	-0,64	-0,61	4,13	6,84
20	Kab. Aceh Tamiang	18,73	5,59	-4,70	12,97	8,15
21	Kab. Bener Meriah	23,71	8,13	-8,80	17,74	10,20
22	Kab. Pidie Jaya	21,72	6,85	37,84	-19,62	11,70

No	Kabupaten/Kota	Tahun (%)				
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Rata-Rata
23	Kota Subulussalam	12,11	-1,53	-7,29	17,42	5,18

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021)

Pada tabel 9 diketahui bahwa rata-rata belanja Operasi kabupaten/kota di Provinsi Aceh mendapatkan hasil positif, yang artinya belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal. Artinya semakin tinggi pertumbuhan PAD, pendapatan dan belanja operasi yang diikuti oleh rendahnya belanja modal, maka pertumbuhannya negatif. Pertumbuhan yang negatif dapat dikatakan bahwa daerah tersebut belum mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerahnya tersebut dari tahun ke tahun.

SIMPULAN

Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Aceh dilihat dari Rasio kemandirian keuangan Daerah sepanjang tahun 2015-2019 tergolong masih sangat rendah dengan pola hubungan yang instruktif, sedangkan pada Kota Banda Aceh memiliki pola hubungan yang konsultif. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Aceh dilihat dari Rasio Efektivitas secara keseluruhan sepanjang tahun 2015-2019 memiliki rata-rata tidak efektif dengan perkembangan rasio yang cukup fluktuatif. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Aceh dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah masih belum efisien, secara keseluruhan sepanjang tahun 2015-2019 memiliki rata-rata tidak efisien dengan perkembangan rasio yang fluktuatif. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Aceh dilihat dari Rasio Pertumbuhan Pendapatan PAD, Pendapatan, Belanja Modal dan Belanja Operasi) sepanjang tahun 2015-2019 memiliki pertumbuhan yang fluktuatif. Artinya pemerintah Provinsi Aceh belum bisa mempertahankan atau meningkatkan rasio pertumbuhan pendapatannya dari tahun ke tahun.

Referensi :

Sumber dari Buku :

- Dailibas, Nasution, R & Suwanda, D. (2020). Panduan Penyusunan rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD). Cetakan pertama. Yogyakarta: CV. Absolute media.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS 23. (Edisi ke 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta :

Salemba Empat.

- Hasibuan, Malayu. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar, Jakfaruddin, Faisal & Suryadi. (2018). *Profil Penyelenggara PTSP se-Aceh*. Banda Aceh: GRStudio.
- Kasmir. (2016). *Analisis laporan keuangan*. Cetakan kesembilan. Jakarta: Rajawali Pers/Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohammad. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance Decentralization and Democratization Transparency and Accountability Value for Money Local Government Financial management Productivity and Competitiveness Welfare State Human Capital Development and Economic Inclusiveness*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Salim & Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

Sumber dari Jurnal, Tesis, Skripsi :

- Annisa, F. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gini*. Tesis Pasca Sarjana Magister Akuntansi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta. Dipublikasi.
- Aulia, N. (2014). *Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012*. *Economics development Analysis journal (EDAJ)* 3(2).
- Azhari, M, Zulfa, A & Murtala. (2020). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. *Jurnal manajemen Indonesia (J-MIND)*. Vol.5 No.1.
- Enumbi, Y. (2021). *An Analysis of Financial Performance of the Puncak Jaya Regency Government*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. Vol.4 No.1.
- Fathah, N.R. (2017). *Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. *Jurnal EBBANK*. Vol.8 No.1.
- Harahap, H.F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli*

- Tengah. *Ekonomis : Journal of Economics and Business* 4(1).
- Harliyani, E.M & Haryadi. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol.3 No.3.
- Harmadi, S.H.B. (2013). Tantangan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Mini Economica: Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 42, 166-178.
- Hartoyo & Arsad. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi*. Vol.4 No.1.
- Machuf, Asnawi & Naz'aina. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND)*. Vol.5 No.1.
- Poyoh, C.M, Murni, S & Tulung J.E. (2017). Analisis Kinerja Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*. Vol.5 No.2.
- Prakoso J.A, Islami, F.S & Sugiharti, R.R. (2019). Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*. Vol.4 No.1.
- Pramita, Puput Risky.2015. Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. Skripsi. Dipublikasikan.
- Ramadani, R. F. (2017). Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Permerintah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomia*, 5(3), 327-345.
- Rusliana, N, Rustandi, A & Komarlina, D.H.L. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol.1 No.2.
- Salhefni & Digdowiseiso, K. (2021). Analisis Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan Tantangannya dalam Mendukung Pencapaian Pertumbuhan Berkualitas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (E-QIEN)*. Vol.8 No.1.
- Suartini, S. 2019. Local Financial Performance and It's Impact on Border Community Welfare. *Mimbar : Journal of Social and Development*, 35(2), 402-410.
- Suartini, S & Sulistiyo, H. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Inovasi*. Vol.17 No.2.
- Tias, N.N (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kemiskinan (Studi pada Kabupaten dan KotaProvinsi Jawa Timur 2011-2013). *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Brawijaya Malang*.

Dipublikasikan.

Sumber dari Internet :

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). DJPK
Kementrian Keuangan Indonesia. Jakarta, Indonesia. www.djpk.kemenkeu.go.id.
(diakses pada 9 April 2021)